

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mata pencaharian penduduk Desa Wonosalam sebagian besar bekerja sebagai petani yang memiliki sawah dan petani penggarap atau buruh tani. Persentasi jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani pemilik sawah sebesar 47% dan jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani penggarap atau buruh tani sebesar 47%. Pekerjaan lain yang banyak dilakukan penduduk di Desa Wonosalam adalah bekerja sebagai pengemudi mobil, becak atau ojek yaitu sebesar 4%. Sedangkan pekerjain lain-lain sebesar 2% yaitu bekerja sebagai pedagang, wiraswasta/wirausaha, karyawan, PNS/pensiunan, tukang/buruh bangunan dan TNI/POLRI/pensiunan. Masyarakat desa hutan Wonosalam sebagian besar mempinyai tingkat pendidikan yang masih rendah karena adanya pemikiran masyarakat bahwa lulus SD saja sudah bagus asalkan bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat namun tingkat pengangguran di desa Wonosalam cukup sedikit.

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang terutama masyarakat sekitar hutan masih tergolong dalam masyarakat miskin karena rendahnya tingkat pendapatan yang disebabkan masih rendahnya juga tingkat pendidikan yang dapat diraih. Selain itu kurangnya pemahaman dalam pengelolaan hutan sehingga tidak ada inovasi-inovasi atau pengembangan dalam pengelolaan hasil hutan yang menyebabkan ketergantungan hasil hutan. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan penebangan hutan untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kurangnya pendapatan masyarakat desa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan tidak adanya keterampilan yang dapat mengembangkan kreativitas dalam pola cocok tanam untuk meningkatkan hasil pertanian membuat masyarakat di Desa Wonosalam untuk melakukan penggundulan hutan. Kegiatan penggundulan hutan ini diantaranya mengakibatkan konversi hutan menjadi lahan pertanian maupun perkebunan serta melakukan pemungutan/pemanenan tegakan hutan secara berlebihan menyebabkan tingkat kerusakan hutan menjadi semakin tidak bisa dikendalikan sehingga dapat menimbulkan bahaya tanah longsor, banjir bandang dan rusaknya ekosistem hutan.

Menurut data dari perhutani KPH Jombang, produksi kayu pertukangan jati mengalami penurunan dari 3.716 m³ menjadi 3.033 m³ pada tahun 2009. Sedangkan

kayu pertukangan rimba mengalami peningkatan sebesar 351 m³ pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.056 m³. Hal ini terjadi karena penurunan kualitas tanah atau menurunnya tingkat kesuburan tanah yang berada di Kecamatan Wonosalam yang terjadi akibat dari bencana longsor. Hutan produksi di Kabupaten Jombang yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air yaitu berada di KPH Gedangan Kecamatan Wonosalam seluas 1.445 Ha yang memiliki kelerengn 25-40 %.

Kondisi hutan produksi di Desa Wonosalam mengalami degradasi dan deforestasi akibat bencana longsor sehingga mengakibatkan menurunnya kelas tegakan yang sesuai dengan kondisi lahan di Desa Wonosalam, selain itu deforestasi hutan di Desa Wonosalam diakibatkan oleh adanya pengalihan fungsi guna lahan dan meningkatnya jumlah penduduk. Kelestarian sumber daya hutan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan Perum Perhutani, karena kerusakan sekecil apapun cepat atau lambat akan merugikan banyak orang. Tanggung jawab bersama ini harus dimulai dari kepedulian, kesadaran dan baru kemudian pemberdayaan masyarakat.

Terganggunya keutuhan hutan akan dapat menimbulkan bahaya erosi tanah. Erosi tanah adalah suatu proses hilangnya lapisan permukaan tanah atas (*top soil*), baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Proses erosi ini dapat menyebabkan menurunnya produktivitas tanah dan daya dukung tanah. Penanaman tanaman sayuran di dalam kawasan hutan bisa meningkatkan terjadinya erosi tanah. Seringkali selama musim hujan, sejumlah besar lapisan tanah dan air bergerak meluncur ke bawah dan merusakkan lapisan tanah atas yang banyak mengandung unsur hara. Jadi selain erosi tanah, bahaya lainnya yang mengancam adalah longsor.

Identifikasi tingkat kerusakan lahan pada lokasi yang rawan bencana alam yang terjadi di Desa Wonosalam diantaranya adalah:

1. Kerusakan pada areal lahan perhutani pada perbatasan Tahura R. Soeryo dengan kondisi kelerengn diatas 40°, yang pada saat bencana longsor dan banjir bandang, diusahakan untuk tanaman semusim (Jagung, Wortel dll) merupakan areal yang rawan terhadap erosi dan tanah longsor.
2. Lokasi lahan perhutani pada areal Tahura R. Soeryo. Pada lahan tersebut hanya ditumbuhi alang-alang sehingga daya resap air sangat rendah untuk menampung air hujan.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan untuk kepentingan yang akan datang dapat membawa dampak pada beberapa faktor yang

menimbulkan tekanan berat terhadap sumber daya hutan di Desa Wonosalam, antara lain :

- a. Konversi hutan untuk pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan;
- b. Penggundulan hutan;
- c. Pemungutan/pemanenan tegakan hutan secara berlebihan.

Terjadinya kerusakan hutan pada Kawasan Hutan Desa Wonosalam terjadi karena adanya factor perilaku manusia, perilaku pengusaha dan kebijakan pemerintah. Adanya factor manusia dan pengusaha yang seringkali mengeksploitasi sumber daya hutan dan kurangnya pedulian pada kondisi ekologi lingkungan di masa yang akan datang dapat menyebabkan banyaknya penggundulan hutan, maraknya illegal logging sehingga terjadi bencana longsor dan erosi.

Rencana Pemecahan Masalah Degradasi Hutan di Desa Wonosalam diantaranya dengan pemberdayaan masyarakat; penghijauan dan agroforestry yang pada dasarnya adalah pola pertanaman yang memanfaatkan sinar matahari dan tanah yang `berlapis-lapis` untuk meningkatkan produktivitas lahan; adanya kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seperti melakukan inventarisasi perambah hutan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat tentang jumlah perambah dan luas yang dirambah. Selain itu memasukkan rencana pengelolaan hutan dalam dokumen perencanaan, desa, kecamatan dan Kabupaten; Insentif-disinsentif dan penegakan hukum; pengenaan sanksi; Kurikulum dengan mengembangkan kurikulum pendidikan yang menunjukkan kaitan antara lingkungan masyarakat setempat dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akibat kerusakan sumber daya; Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dan tebang pulih yang diterapkan pada areal bekas tebangan dan non hutan yang telah, ditetapkan sebagai areal THPB dalam RKUPHHK, sistem silvikultur untuk membangun tegakan seumur, teknik pemanenan dengan tebang habis, meningkatkan produktivitas lahan dengan permudaan buatan. Tujuan THPB adalah memaksimalkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungan setempat. Sasaran THPB adalah hutan alam produksi bekas tebangan di areal Hutan Produksi (HP) atau Hutan Produksi Konversi (HPK); dan keamanan sebagai upaya mengurangi kerugian akibat gangguan keamanan utamanya pencurian pohon, perlu dilakukan kegiatan operasi pengamanan dan patroli didalam maupun diluar kawasan hutan baik yang dilakukan oleh Perum Perhutani maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan pihak eksternal/aparat keamanan terkait. Di dalam kegiatan pengamanan hutan personil

bertugas menjaga kelestarian hutan dari gangguan keamanan baik secara struktural maupun fungsional.

Tingkat partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan di Desa Wonosalam sudah masuk dalam tingkatan *placation* (peneteraman) yaitu sudah diterimanya masukan atau saran dari masyarakat desa hutan namun masukan tersebut belum tentu ditindak lanjuti oleh pemerintah maupun perhutani.

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan memang sangat ideal dalam rangka pemanfaatan lingkungan berbasis kepentingan masyarakat. Namun dalam praktek, proses pelibatan bukan berarti tanpa kendala yang mana kendala tersebut justru akan berpengaruh pada tujuan dari pelibatan itu sendiri. Terdapat beberapa kendala yang perlu memperoleh perhatian dalam merancang rencana pelibatan masyarakat. Kendala-kendala dimaksud adalah antara lain:

- Semakin banyaknya kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan, baik mereka yang diundang ataupun tidak sebagai pengelola dan pemanfaatan hutan yang justru menghambat proses komunikasi yang hendak dibangun.
- Banyaknya kelompok-kelompok tersebut terutama yang aktif mewakili kepentingan kelompok stakeholders yang akan terkena suatu kebijakan. Akibatnya pemerintah dan atau pengusaha harus melakukan usaha khusus untuk melakukan pendekatan terhadap kelompok stakeholders tersebut. ini tentunya berkaitan dengan kesulitan untuk menentukan siapa yang menjadi wakil masyarakat.
- Masyarakat kurang memahami Informasi tentang lingkungan dan bahaya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Biasanya masyarakat baru akan mengeluh apabila sudah menderita kerugian. Tingkat kesadaran yang kurang ini bisa dipahami karena kehidupan mereka sudah disibukkan dengan aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- Kurangnya atau tidak adanya informasi dalam masyarakat tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Hak dimaksud adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta kewajiban memelihara lingkungan.

Arahan pemanfaatan hutan produksi di Desa Wonosalam dibagi menjadi dua menurut kepemilikan hutan, yaitu hutan kawasan milik pemerintah dan hutan masyarakat. Prioritas rencana pengelolaan hutan produksi bersama masyarakat desa hutan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan berdasarkan tiga tujuan utama, yaitu menekan tingkat degradasi hutan, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan meningkatkan sumber daya manusia. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan bisa dicapai dengan empat alternative strategi yaitu mengembangkan hasil hutan secara optimal, kemitraan antara masyarakat dinas terkait dan pihak ketiga, mengoptimalkan koperasi MDH, dan meningkatkan sarana produksi yang sesuai dengan masyarakat desa hutan. Sedangkan alternative strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan menekan degradasi hutan dapat dilakukan dengan cara agroforestry, tebang habis permudaan buatan (THPB), penegakan hukum dan penghijauan berkelanjutan, sedangkan untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa Wonosalam alternative strategi yang akan dilakukan yaitu pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di tingkat sekolah dan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan. Untuk pengelolaan hutan kawasan milik negara dilakukan alternatif penghijauan berkelanjutan dan pengoptimalan koperasi MDH. Dua tujuan ini lebih diutamakan karena adanya hutan kawasa merupakan tanggung jawab yang dibebankan oleh masyarakat yang pengelolaannya dapat dimaksimalkan sesuai dengan keadaan lingkungan agar tetap berkelanjutan. Selain itu adanya rencana RTRW yang mempertahankan lahan hutan sebesar 30% dari luas wilayah Kabupaten Jombang.

Prioritas rencana pengelolaan hutan produksi bersama masyarakat desa hutan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan berdasarkan tiga tujuan utama, yaitu menekan tingkat degradasi hutan, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan meningkatkan sumber daya manusia. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan bisa dicapai dengan empat alternative strategi yaitu mengembangkan hasil hutan secara optimal, kemitraan antara masyarakat dinas terkait dan pihak ketiga, mengoptimalkan koperasi MDH, dan meningkatkan sarana produksi yang sesuai dengan masyarakat desa hutan. Sedangkan alternative strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan menekan degradasi hutan dapat dilakukan dengan cara agroforestry, tebang pilih, dan penghijauan berkelanjutan, sedangkan untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa Wonosalam alternative strategi yang akan dilakukan yaitu pengembangan kurikulum pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan secara lestari di

tingkat sekolah dan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat desa hutan. Alternative strategi untuk Hutan Rakyat adalah kemitraan dan meningkatkan sarana produksi. Dua alternatif prioritas pengembangan dengan dua rencana tersebut dimungkinkan dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat desa hutan dan karena dalam pengelolaan hutan rakyat lebih menitik beratkan pada tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan.

5.2 Saran

Dari pemaparan di atas, terdapat beberapa hal mendasar yang dapat direkomendasikan antara lain:

1. Perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota), Perum Perhutani, dan Masyarakat Desa Hutan;
2. Larangan merubah fungsi dan kepemilikan hutan;
3. Pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh perum perhutani KPH Jombang dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
4. Memasukkan rencana pengelolaan hutan dalam dokumen perencanaan, desa, kecamatan dan Kabupaten;

